

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu mengkaji sumber-sumber penelitian dahulu yang relevan dengan fokus penelitian dengan tujuan dapat mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sedang akan peneliti lakukan yang kemudian akan menjadi rujukan bagi peneliti terkait pengembangan objek fokus penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Dedy Tardiyo	Dewi Gartika, Muthya Diana	Ahmad Subhan
Luaran Laporan Penelitian	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara	CR Journal	Jurnal Ilmu Pemerintahan <i>Cosmogov</i>
Tahun	2020	2020	2015
Universitas / Lembaga	Universitas Subang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	Universitas Padjadjaran
Judul	Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang	Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program <i>Ecovillage</i> di Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung Barat	Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>
Latar Belakang	Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat lalu luas wilayah	Batubara kian menimbulkan masalah yang amat

	<p>Kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, akan tetapi perlu diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi. Persoalan terkait rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) bahwa perlu adanya penanganan ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas lingkungan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas permukiman melalui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).</p>	<p>yang tidak bertambah menjadikan daya dukung lingkungan hidup menurun kemudian diperparah dengan pola hidup penduduk yang kurang menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dengan meluncurkan Program <i>Ecovillage</i> sebagai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup (sampah, sanitasi, limbah, konservasi dan rehabilitasi hutan, tanah dan air) untuk mewujudkan lingkungan yang berdampak kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan sekitar.</p>	<p>kompleks di Provinsi Jambi salah satu masalahnya dari sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke <i>stockpile</i> yang biasanya dibawa diangkut oleh truk-truk besar menuju pelabuhan di timur Jambi dari daerah tambang di barat Jambi. Mobilisasi truk yang kian hari semakin ramai telah menimbulkan masalah baru yaitu kerusakan di sepanjang ruas jalan umum yang biasa dilalui kendaraan umumnya. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang kurang mengedepankan aspek keberlanjutan karena hanya berorientasi kepada pencarian pendapatan semata maka diperlukan adanya sinergi dan harmonisasi di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik pemerintah, swasta dan masyarakat melalui konsep jejaring kebijakan.</p>
Teori	<p>Jejaring Kebijakan Kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007). Berpendapat bahwa</p>	<p>Katzenstein dalam Hidayat, dkk (2015) menggunakan konsep <i>network</i> untuk</p>	<p>Kickert <i>et.al</i> (1997) mengungkapkan jejaring kebijakan sebagai kajian pola</p>

	<p>“<i>collaborative governance</i> adalah proses pembentukan, pengarahan, pemantauan pengaturan suatu organisasi yang lintas sektoral untuk mengatasi masalah jejaring kebijakan publik (<i>Policy Network</i>) yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu sektor publik saja”. Jejaring kebijakan berdasarkan kepada <i>multipartners governance</i> dengan melibatkan partisipasi sektor publik, sektor swasta dan masyarakat.</p>	<p>karakteristik umum hubungan antar sektor privat dan publik dalam implementasi kebijakan. Sawitri (2008) dalam Ifah dkk (2012) menjelaskan jejaring kebijakan pada perumusan kebijakan sebagai kontribusi atas perubahan tujuan aktor-aktor yang ber sarat akan pentingnya nilai-nilai motivasi dan kepentingan.</p>	<p>relasi sosial antar aktor yang berkaitan satu sama lainnya yang bersama-sama berperan dalam proses kebijakan publik. Emoth (2011) juga menjelaskan jejaring kebijakan memiliki karakteristik yaitu saling ketergantungan, koordinasi, dan bersifat plural.</p>
Metode Penelitian	<p>Metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif deskripsi yang berbasis kepada informasi secara empiris di lapangan. Melalui pengambilan sampel data dengan pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar dan informasi serta interpretasi setiap temuan. Dengan sumber data yang secara primer dari wawancara dan sekunder dari informasi yang termuat di buku, jurnal, koran, dll.</p>	<p>Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa gambaran secara tertulis atas fenomena yang diteliti. Melalui teknik pengumpulan data primer menggunakan <i>purposive sampling</i> dalam proses wawancara dan studi dokumentasi sebagai tindak lanjut analisis hasil penelitian dengan teknik triangulasi.</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong <i>desk-study</i> dengan mengutamakan data sekunder dari dokumen peraturan formal dari media massa. Analisis data menggunakan analisis kualitatif karena data akan diklarifikasi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui pemeriksaan keabsahan pada teknik triangulasi</p>

			pada sumber data dan metode.
Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Jejaring Kebijakan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang belum efektif setelah dikaji melalui teori Van Warden yang memiliki indikator aktor, fungsi, struktur, institusi, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor. Faktor Aktor, Fungsi, Struktur dan Institusi Kelembagaan berjalan efektif dan membentuk jaringan masyarakat terstruktur. Namun terdapat faktor yang belum efektif yaitu Aturan Bertindak karena dinilai belum adanya regulasi khusus untuk program KOTAKU, Hubungan Kekuasaan dimana masih terdapat tumpang tindih di antara peran pemangku kepentingan dan Aktor Strategis dalam jejaring kebijakan karena Bupati Subang ataupun dinas terkait belum mengoptimalkan sinergitas dengan partisipan yang terlibat.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukan terdapat aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan Program <i>Ecovillage</i> yaitu dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di <i>leading sector</i> oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama dan penganggaran serta Pemerintah Desa Mekarmukti yang membawahi Pokja <i>Ecovillage</i> Mekarmukti untuk memberikan edaran formal kepada masyarakat dan penetapan kader Pokja <i>Ecovillage</i>. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya komitmen Kepala Desa dalam implementasi dan pendampingan kader Pokja, terbatasnya anggaran operasional dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Maka peneliti menyarankan perlu hadirnya aktor dari media, lembaga riset/perguruan tinggi dan stakeholder lainnya secara luas untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam Program <i>Ecovillage</i> dapat berjalan berkelanjutan.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya titik relasi aktor yang perlu dibentuk proses berkelanjutan karena dapat terlihat dari hubungan antar pemerintah yang harmonis dan kondusif sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan kemudian hubungan dengan pihak non-pemerintah (swasta dan masyarakat) bersifat konstruktif dengan mengedepankan kolaboratif. Namun masih ditemui hambatan seputar kurang ditegaskannya regulasi karena masih ditemui banyak pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara yang merusak jalan umum kemudian perbedaan pandangan antara Pemerintah dan Pengusaha batubara yang berujung perselisihan antara dua pihak. Maka perlu adanya komitmen antara pihak terkait untuk bersama-sama</p>

			dapat menegakan hukum serta penyediaan jalur alternatif untuk mobilisasi logistik batubara melalui revitalisasi jalur sungai dan aktivasi rel kereta api daerah.
Research Gap	Keunggulan dari penelitian yang peneliti kaji akan secara komprehensif menjawab luaran jejaring kebijakan dalam aktivasi Ruang Kerja Bersama di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.	Keunggulan dari penelitian yang peneliti kaji akan secara komprehensif menjawab luaran jejaring kebijakan dalam aktivasi Ruang Kerja Bersama di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.	Keunggulan dari penelitian yang peneliti kaji akan secara komprehensif menjawab luaran jejaring kebijakan dalam aktivasi Ruang Kerja Bersama di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Sumber: Jurnal Hasil Penelitian Terdahulu Tahun 2015 dan 2020

2.1.2 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologis terdiri dari bahasa latin yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” jika dalam bahasa indonesia berarti melayani atau memenuhi. Menurut Liang Gie dikutip oleh Syafiie (dalam Sellang, 2016) bahwa Administrasi adalah serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi juga mencakup berbagai cabang, salah satunya adalah administrasi publik. Administrasi publik meliputi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan berkaitan dengan publik.

Definisi Administrasi Publik menurut Dunsire dalam Keban (2008:2) diartikan sebagai:

“Administrasi sebagai proses arah pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan analisis pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individu dan kelompok untuk penyediaan kebutuhan publik dan area kerja dalam lingkup akademik dan teoritik.”

Selanjutnya, Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) menjelaskan

Administrasi Publik sebagai:

“Proses di mana sumber daya serta personel publik secara terorganisir yang dikoordinasikan untuk formulasi, implementasi dan pengelolaan bermacam keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi Publik juga sebagaimana dijelaskan Keban ditunjukan bagaimana pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa memosisikan sebagai regulator yang aktif dan penuh inisiatif dalam pengaturan ketika pengambilan arah yang dirasa penting dan baik untuk masyarakat luas.”

Adapun peran administrasi publik menurut Gray (1989:15-16) dalam buku

“Teori Administrasi Publik” (2017;9) yang menjelaskan poin penting peran daripada administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- 1) Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional secara inklusif kepada kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin dengan berdasarkan prinsip keadilan,
- 2) Memberi perlindungan kepada hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan serta adanya penjaminan kebebasan bagi rakyat agar dapat melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam sektor pelayanan strategis seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan utamanya bagi masyarakat lanjut usia,
- 3) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang amat bervariasi serta memberi jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai akan mampu berkembang sesuai relevansi perubahan zaman serta selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses yang secara terorganisasi mengarahkan kepada penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan kepentingan publik. Serta administrasi publik

merupakan bentuk administrasi dari negara sebagai organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kenegaraan dan kepentingan publik.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan secara etimologis dalam bahasa Yunani, berasal dari kata *polis* yang berarti negara-kota, kemudian pada bahasa Latin disebut *politia* yang artinya negara hingga akhirnya ke dalam bahasa Inggris menjadi *policy* yang pengertiannya terkait urusan perintah atau pengelolaan administrasi pemerintah. C.J Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau agenda hasil usulan individu, kelompok atau pemerintah di dalam satu lingkup tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan peluang terhadap implementasi usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat demikian menunjukkan bahwa kebijakan menitikberatkan adanya pelibatan perilaku yang dimaksud dan tujuannya sebagaimana bagian yang sama-sama penting dari rangkaian kebijakan yang harus menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang harus dikerjakan daripada apa yang diusulkan semata. Keterkaitan dengan adanya pelibatan dalam rangkaian kebijakan tersebut kembali kepada publik sebagai sasaran. Rusli (2013:34) menyatakan bahwa Publik sendiri dikonsepsikan sebagai wadah atau ruang yang terdapat aktivitas manusia sehingga perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan-aturan atas dasar tindakan bersama.

Kebijakan publik adalah setiap alternatif pemilihan keputusan-keputusan yang dibuat negara sebagai strategi dalam rangka merealisasikan tujuan dan

harapan negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Menurut Eyestone yang dikutip Agustino dalam buku Kebijakan Publik bahwa Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Beberapa anggapan menyebut definisi yang dikemukakan tersebut terlalu luas untuk dipahami, karena mengenai kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kemudian Nugroho, mengemukakan terdapat dua karakteristik kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik dipahami maknanya karena terkait kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan negara;
2. Kebijakan publik diukur karena mengukur sejauh mana progres kemajuan tujuan yang telah dicapai.

Menurut Nugroho (2012:93) Kebijakan publik merupakan dimensi-dimensi dari tiga kehidupan penyelenggara negara, yaitu:

1. Dimensi Hukum, kebijakan publik sebagai fakta hukum suatu bentuk penyelenggaraan negara sehingga setiap luaran kebijakan publik mengikat seluruh anggota masyarakatnya.
2. Dimensi Politik, kebijakan publik sebagai hasil proses politik yang secara demokratis yang dibangun oleh lintas sektoral atas kepentingan bersama, bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu.
3. Dimensi manajemen, kebijakan publik direncanakan atau diformulasikan melalui lembaga dan organisasi yang dipimpin pemerintah bersama organisasi eksekutif yang melibatkan peran masyarakat secara luas untuk mencapai hasil optimal dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yakni pengorganisasian, perencanaan, pengendalian dan kepemimpinan.

Kebijakan publik dalam proses agendanya tidak begitu langsung lahir, tetapi melalui rangkaian proses yang terstruktur. Thomas R. Dye dalam Widodo (2018:16) menjelaskan proses agenda *setting* kebijakan publik meliputi tahapan berikut:

1. Identifikasi masalah, melakukan identifikasi masalah yang terjadi atas tuntutan dan respon pemerintah.
2. Agenda *setting*, memfokuskan prioritas atas alternatif-alternatif pengambilan keputusan sebagai respon atas masalah publik yang *urgent*.
3. Perumusan kebijakan, tahapan inisiasi atas usulan-usulan rumusan kebijakan alternatif yang terorganisasi atas perencana kebijakan, kelompok kepentingan, lembaga birokrasi pemerintahan dan masyarakat.
4. Pengesahan kebijakan, sebagai legalitas yang melalui tindakan politik oleh lembaga negara pemerintah dan eksekutif dan legislatif.
5. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan melalui proses birokrasi melibatkan aktivitas ranah eksekutif secara terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan, sebagai aktivitas monitoring oleh lembaga pemerintah dengan konsultan beserta unsur elemen lainnya seperti lembaga non-pemerintah, media dan masyarakat.

Berdasarkan tahapan proses kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, inti kebijakan publik erat kaitanya dengan pemecahan rumusan masalah, agenda kebijakan yang dirumuskan, alternatif keputusan kebijakan apa yang ideal untuk diambil dan bagaimana kebijakan publik diimplementasikan kemudian dievaluasi. Pada penelitian ini berada pada tahap implementasi kebijakan terkait bagaimana jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program aktivasi ruang kerja bersama (*co-working space*).

2.1.4 Jejaring Kebijakan

Konsep jaringan (*network*) telah berkembang sejak abad 19, dimana jejaring memiliki arti meliputi atau mencakup dengan jaringan yang terhubung. Parson (2006:186) mengungkapkan istilah jejaring digunakan untuk dua hal namun kedua dipakai oleh para teoritisi jaringan seperti penggunaan kata kerja (*verb*), menyusun jaringan (*to network*) yang artinya menjalin hubungan kontak dalam mencapai tujuan keuntungan.

Beberapa pemahaman terkait jejaring kebijakan, namun kembali lagi dari asalnya untuk konteks apa keterkaitannya. (Raab dan Kennis, 2009:198) dalam penjelasannya mengemukakan jejaring kebijakan adalah kelompok organisasi yang terkait ketergantungan akses sumber daya yang dibentuk lebih dari dua organisasi yang saling membentuk hubungan kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. De Leon dan Varda (2009:62) menjelaskan secara umum bahwa jejaring kebijakan dipahami sebagai elemen struktural dari jaringan kolaborasi antar komponen-komponen yang terlibat dalam hubungan timbal balik, keterwakilan dan kesetaraan.

Klijn and Koppenjan (2000:138) juga mengamati bahwa konsep jaringan terkait konteks ilmu kebijakan utamanya dalam studi implementasi kebijakan melalui pendekatan “*bottom-up*” sebagai resistensi terhadap pendekatan “*top-down*”. Kemudian konsep ini berkembang untuk memetakan hubungan antar-organisasi untuk menilai pengaruh pola-pola terhadap proses kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan akan efektif jika pelaksanaannya diiringi identifikasi *stakeholder* terkait kepentingan dan peran yang didukung dalam strategi organisasi untuk bekerja sama. Jejaring kebijakan hadir untuk menuntun proses kebijakan dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai pencapaian publik.

Kemudian Bevir dan Richards (2009:23) mengamati perkembangan konsep jejaring yang semakin terlihat ketika saat didistribusikannya kekuasaan kepada beberapa agen aktor dalam ranah kebijakan tertentu untuk mencapai efektivitas

kebijakan. Dapat dikatakan bahwa penyebaran kewenangan, kekuasaan, tugas, fungsi, peran perlu diiringi dengan integrasi atau penyatuan yang dikenal dengan istilah “koordinasi”.

Adapun ciri karakteristik jejaring kebijakan menurut Enroth dalam Nurliawati (2016:40), yaitu:

1. Pluralisme

Jejaring kebijakan akan terbentuk ketika terdapat keberagaman dalam prosesnya dalam konteks heterogenitas yang mengarah pada sikap kebhinekaan atau rasa persatuan antar aktor, sektor, kepentingan, strategi, sumber daya dan kekuatan.

2. Interdependensi

Sikap ketergantungan yang menyertai hubungan dalam proses jejaring kebijakan terkait konteks hubungan ketergantungan yang menjadi kunci keberhasilan jejaring kebijakan yang biasanya bersifat kemitraan (*partnership*).

3. Intersubjektivitas

Setiap aktor yang terlibat jejaring kebijakan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menginterpretasi visi kebijakan sesuai dengan latar belakang, kemampuan dan daya pemahaman bahkan kepentingannya. Ketika objektivitas sulit untuk tercapai dan subjektivitas dimungkinkan namun kebenaran yang terjadi bersifat lintas subjek yang pada akhirnya antar aktor yang terlibat mencari pola yang tepat untuk mempertahankan hubungan melalui komunikasi dan mengedepankan dialog dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai konsensus.

4. Otonom

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yang sama sejatinya aktor tersebut bersifat otonom. Mereka tetap berdiri di atas kepentingannya karena tidak dalam garis komando yang linear yang tidak berhirarki. Sehingga aktor pelaku kebijakan dapat berasal dari bermacam organisasi yang berbeda latarnya.

5. Lintas Batas

Meliputi pola interaksi antar aktor yang terlibat yang tidak terbatas yang kemudian terciptanya hubungan berkembang antar sektor pemerintah dengan swasta atau dunia internasional tanpa melalui sekat hierarki birokrasi.

Menurut Rhodes dalam Howlett dan Ramesh (1995:127); dalam Sri Suwitri (2008:32) serupa menyatakan bahwa interaksi antar kelembagaan dalam konteks

lembaga publik atau pemerintah dan organisasi kemasyarakatan merupakan jejaring kebijakan bersifat instrumental yang bergantung kepada kekuatan pada tingkat integrasi ikatan keanggotaan serta membangun hubungan dengan publik. Sementara Suwitri (2011:6) menjelaskan jejaring kebijakan sebagai hubungan saling ketergantungan diantara aktor-aktor perumus kebijakan. Dinyatakan lebih lanjut bahwa organisasi publik baru atau modern membutuhkan wadah jejaring kebijakan untuk mempermudah perumusan kebijakan dan memperlancar implementasi kebijakan publik sekaligus mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah benar-benar relevan dengan kepentingan publik.

Berbagai analisis mempertimbangkan teori jejaring kebijakan lebih baik dalam menjawab tantangan stabilitas kebijakan daripada perubahan kebijakan. Selaras dengan yang dikemukakan Marsh dan Rhodes (1992:261) bahwa jejaring kebijakan tidak memberikan penjelasan mengenai perubahan kebijakan, namun pandangan untuk tidak memberikan penjelasan terkait perubahan yang sebenarnya keliru.

2.1.5 Model Jejaring Kebijakan

Menurut Dunn dalam Solahudin (2010:72) menjelaskan model jejaring kebijakan bermacam-macam tipe menyesuaikan konteks sistem masalah yang akan memudahkan dalam upaya mengurangi kompleksitas sehingga dapat dikelola oleh bagian aktor analisis kebijakan. Jelas bahwa sebuah model diperlukan untuk alat bantu proses analisis, evaluasi dan sintesis sebuah kebijakan sehingga dalam pemanfaatannya dapat optimal.

Hidayat dan Susanti (2015:5) mengungkapkan terkait model jejaring kebijakan terdiri dari beberapa dimensi, diantaranya:

1. Aktor, yaitu terkait formulasi kebijakan karena terkait antara jumlah dan peran dari setiap pihak yang terlibat.
2. Fungsi, yaitu sebagai penghubung perspektif antara struktur dan aktor.
3. Struktur, merujuk kepada pola hubungan antar aktor-aktor terkait.
4. Kelembagaan, merujuk kepada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya.
5. Aturan bertindak, merujuk jejaring yang terbiasa membentuk kebiasaan dalam aturan main dalam interaksi dalam suatu jaringan utamanya dalam pertukaran informasi contohnya.
6. Hubungan kekuasaan, terkait hasil pengamatan pada pembagian kekuasaan.
7. Strategi aktor, yaitu aktor yang terlibat kemudian menggunakan jejaring untuk strategi untuk mengatur interdependensi antar sesama aktor lainnya.

Selanjutnya Suwitri (2011:19) menjelaskan terkait perumusan jejaring kebijakan biasa terjadi di Indonesia setidaknya terdapat 3 jenis jejaring kebijakan yaitu:

1. Jejaring kebijakan horizontal yaitu keterbukaan hubungan antar *stakeholder* pada tataran sub sistem kebijakan yang berdasarkan opini elit.
2. Jejaring kebijakan vertikal yaitu keterbukaan antar *stakeholder* dalam koalisi yang terbentuk dalam subsistem kebijakan masing-masing hanya bagi perumusan opini elit.
3. Jejaring kebijakan model laba-laba yaitu keterbukaan luas diantara *stakeholder* dalam koalisi pada sub sistem kebijakan dengan peran penengah berposisi secara terpusat dalam jejaring kemitraan.

De Leon dan Varda (2009:60) kemudian memperkenalkan teori jejaring kebijakan kolaboratif (*collaborative policy network*) tidak hanya memfokuskan kepada komposisi pemangku kepentingan atau aktor suatu kemitraan, tetapi menjelaskan juga bagaimana para aktor pemangku kepentingan di berbagai struktur kelembagaan dan cenderung adanya pertukaran diskursif kebijakan, implementasi dan evaluasi. Adapun karakter daripada jejaring kebijakan kolaboratif, yaitu:

1. *Representation / Diversity*

Menurut Benner dalam De Leon dan Varda (2009:67) bahwa Jaringan multi sektoral mencerminkan peran masing-masing aktor kebijakan untuk menyatukan berbagai unsur kelompok dan sumber daya untuk membahas masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor kebijakan. Kekuatan utama jaringan adalah keanekaragaman bukan keseragaman. Keberagaman di antara para pemangku kepentingan utamanya ketika dialog kebijakan dapat mengambil manfaat atas kreativitas dan informasi yang bermacam-macam dari aktor lainya untuk menambah nilai-nilai proses kebijakan publik.

2. *Reciprocity* atau Timbal balik

Pertukaran atau timbal balik dalam konteks kebijakan publik dapat mencakup sumber daya secara berwujud dan tidak berwujud antar sesama aktor pemangku kepentingan yang tergabung dalam jejaring kemitraan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan diantara kemitraan jejaring kebijakan. Menurut Rhodes (2005:431), hubungan timbal balik timbul akibat adanya pertukaran sumber daya yang dibangun atas saling kepercayaan karena organisasi membutuhkan sumber daya dari organisasi lain untuk mencapai tujuan.

3. *Horizontal Power Structure*

Agranoff (2007) mengungkapkan bahwa karakteristik yang menentukan suatu jejaring kebijakan bahwa bukan kepada jejaring yang terstruktur pada hierarki birokrasi, melainkan lebih kepada struktur kekuasaan yang horizontal.

Hubungan yang tidak hirarkis akan membuka implementasi kebijakan publik yang lebih kolaboratif.

4. *Embeddedness*

Embeddedness dalam teorinya menggambarkan bahwa orang akan memilih dari satu alternatif pilihan berdasarkan interaksi di masa lampau yang akan membuat koneksi baru dengan orang-orang yang dipercayai. Menurut Zukin dan Dimaggio (1990:36) bahwa kategori *embeddedness* mencakup kognitif, budaya, struktural dan politik. Merujuk kepada jejaring kebijakan kolaboratif untuk dapat berjalan baik apabila para pemangku kepentingan saling mengenal satu sama lain dan memiliki kedekatan secara emosional untuk membangun kepercayaan dalam proses kebijakan publik.

5. *Trust and Formality*

Jejaring kebijakan tidak akan tercapai apabila tidak diiringi kepercayaan yang substansial dan sikap formalitas diantara para pemangku kepentingan dan akan mengancam keberlangsungan implementasi jejaring kebijakan. Kepercayaan sangat penting untuk dibangun diantara aktor kebijakan dalam proses jejaring kebijakan. Menurut Seable dalam Gidden (1990:67) bahwa tata kelola pemerintah yang dijalankan bersama oleh aktor yang saling percaya satu sama lainnya akan menciptakan struktur kelembagaan baru yang selalu mengedepankan dialog untuk mencapai tujuan.

6. *Participatory Decision Making*

Keterkaitan konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan. Menuju partisipasi demokrasi adalah proses menuju pengambilan keputusan kolaboratif

yang inklusif mewakili kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan. De Leon dan Varda (2009:70) berpendapat bahwa transparansi jejaring kebijakan kolaboratif akan mendorong kepada pencapaian misi, tujuan serta partisipasi organisasi dalam jejaring kebijakan.

7. *Collaborative Leadership*

Jejaring kebijakan kolaboratif mendorong setiap pemimpin untuk peka dan mewakili rasa kesetaraan, karena pemimpin tidak dipilih karena pengaruh finansial tetapi berdasarkan kemampuan mereka untuk mengakomodir semua kepentingan dalam jejaring kebijakan. Sikap kepemimpinan ini dalam konteks pengelolaan kebijakan menuntut untuk dapat mengkoordinasikan bagaimana kerja dalam jejaring kebijakan.

2.1.6 Aktor Jejaring Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sejatinya tidak dapat berlangsung jika mengandalkan satu aktor yaitu lembaga pemerintah sendiri karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya untuk mengelola dan merespon setiap kebutuhan publik yang dinamis dan beragam. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memanfaatkan pola kemitraan dan kerjasama dengan *stakeholder* lainnya baik sesama lembaga pemerintah, swasta, bahkan komunitas masyarakat sipil.

Stakeholder dinamai sebagai aktor-aktor kebijakan publik, kemudian saling bekerjasama yang akhirnya menciptakan hubungan baru antara organisasi publik dengan swasta yang dikenal *public private partnership*. Aktor kebijakan terdiri dari: 1) *elected officials* yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; 2) *appointed officials* yaitu pejabat politik terpilih untuk duduk dalam tatanan birokrasi; 3)

interest group; 4) *research organization*; 5) *mass media*. Kemudian aktor-aktor tersebut saling berinteraksi sebagai keberlanjutan langkah suatu kebijakan.

Identifikasi aktor-aktor kebijakan yang secara intens bergerak dalam tata kelola pemerintahan mencakup pemerintah (*state*), swasta (*private*) dan masyarakat (*civil society*) yang kemudian membentuk pola interaksi yang dikenal *good governance* yang berarti untuk terciptanya tata kelola pemerintah yang baik diperlukan keterlibatan tiga aktor tersebut. Era *good governance* akhirnya mengarah kepada partisipasi peran multi aktor. Kemudian Etzkowitz dalam Subarsono (2016;227) memperkenalkan istilah *triple helix* yang merupakan model kerjasama multi aktor yang menggambarkan sinergitas pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta untuk bekerja sama untuk menghasilkan inovasi berbasis pengetahuan ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Etzkowitz (2003) pada analisis *triple helix* dalam interaksinya yakni swasta atau industri dunia usaha sebagai pelaksana lokus dari produksi, pemerintah sebagai sumbu hubungan kontraktual untuk menjamin interaksi yang stabil melalui regulasi yang tersedia, dan perguruan tinggi sebagai aktor riset sumber pengetahuan dan teknologi baru untuk menciptakan kebijakan berbasis pengetahuan.

Yason (2012) kemudian berpendapat terkait model *triple helix* dimana pemerintahan, swasta dan kelompok akademisi melewatkan elemen penting yaitu keterlibatan masyarakat sehingga seiring perkembangannya kembali hadir model *quadruple helix*. Carayannis dan Campbell (2009:206) menambahkan elemen *helix*

yaitu masyarakat berbasis komunitas media dan budaya yang kemudian berasosiasi dengan media, industri kreatif, budaya dan gagasan. Namun prinsip tersebut memposisikan masyarakat sebagai elemen yang tidak memiliki pengaruh kuat sehingga kembali mengalami perkembangan model *pentahelix* yang meliputi pemerintah, kelompok akademisi, swasta, masyarakat sipil, dan media massa. Cazalda (2017:17) menjelaskan bahwa *penta helix* menggambarkan konsep kemitraan multi *stakeholder* yang terdiri *public, academia, private, civic society, and social entrepreneurs*. Adapun skema model *penta helix* seperti yaitu:



Gambar 2.1

Model *penta helix*

Sumber: Calzada (2017)

2.1.7 *Co-working Space*

Gandini (2015) menyatakan “*coworking*” yang artinya aktivitas bekerja sendiri dilingkungan yang berisi para pekerja namun dalam bidang pekerjaan yang berbeda-beda, sedangkan arti “*co-working*” yaitu mengerjakan suatu pekerjaan secara kolektif bersama-sama di tempat yang sama yang biasa disebut ruang kerja bersama yang di dalamnya tergabung para pekerja dari latar belakang jenis

pekerjaan yang berbeda untuk dapat berkolaborasi dari perbedaan yang didapati biasa disebut *Co-working space*.

Sementara itu menurut Septiani dkk (2017) berpendapat ruang kerja bersama adalah tempat dimana tersedianya pekerja mandiri yang profesional bekerja dengan bersamaan dan berdampingan sesama pekerja profesional lainnya satu sama lain sehingga akan berdampak terhadap perkembangan karir dan jaringan pekerjaan. *Co-working space* sebagai tempat kolaborasi yang mempertemukan berbagai pekerja dari berbagai disiplin ilmu yang menciptakan jaringan kerja yang saling terhubung antar disiplin ilmu antara berbagai kelompok pekerja, komunitas dan kelompok masyarakat lainnya. Ruang kerja bersama didasarkan kepada nilai-nilai utama seperti partisipasi dan keterbukaan dalam berbagi pikiran, pengetahuan, dan pengalaman untuk menghasilkan inovasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui ruang kerja bersama yaitu:

1. Membangun komunitas kerja baru kepada para *coworker*
2. Meningkatkan peluang *coworkers* dalam hal bersosialisasi
3. Mendukung suasana kerja yang lebih kreatif dan kondusif
4. Mendorong kerja yang efektif, produktif yang penuh akan motivasi
5. Memperluas jejaring secara profesional.

Stumpf (2013:6) menyebutkan *Co-working space* memiliki nilai-nilai antara lain yaitu:

- a. Komunitas
Keberhasilan pengembangan *co-working space* tergantung kepada komunitasnya karena terlihat sebagai layanan penghubung dua arah dimana

para pekerja profesional bahkan *freelancer* berkunjung ke *co-working space* untuk menjadi bagian dari interaksi *social society* yang berangkat dari intensnya interaksi sosial baik formal maupun informal seperti selingan pembicaraan yang kemudian menjadi sebuah keputusan melalui interaksi formal.

- b. **Aksesibilitas**
Aksesibilitas terkait pengembangan *co-working space* mencakup empat hal yakni inklusifitas dimana dapat menjadi ruang bagi semua kalangan, keuangan dalam hal memberi layanan dengan harga yang terjangkau bahkan gratis, lalu keterbukaan dalam menyambut tamu komunitas, dan ramah bagi penyandang disabilitas.
- c. **Kolaborasi**
Aktivitas pekerjaan dalam *co-working space* membutuhkan kerja sama untuk menyatukan ide dan gagasan dari beragam pekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga mengarah kepada kemitraan profesional antar pekerja atau aktor yang diawali kesediaan antar individu untuk bekerja sama dengan orang lain dimana kolaborasi terkait juga dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- d. **Komunikasi**
Proses kolaborasi sebagai pembelajaran melalui kesediaan yang aktif untuk berbagai pengetahuan antar sesama. Tanpa komunikasi orang-orang yang terlibat hanya akan memanfaatkan namun tidak untuk berkontribusi.
- e. **Keterbukaan**
Makna keterbukaan merujuk kepada terbukanya pola pikir terhadap gagasan atau ide dari sudut pandang yang berbeda dan mampu untuk menerima pola pikir sendiri dan terbuka untuk selalu belajar sebagai rasa ingin tahu yang lebih. Kepercayaan sebagai kunci utama membangun keterbukaan sebagai proses pencapaian kerja bersama yang menghasilkan umpan balik yang berkualitas.
- f. **Kreativitas**
Sikap kreatif dalam menumbuhkan pola pikir sebagai bekal utama yang harus dimiliki oleh setiap *coworkers*. Untuk menjawab tantangan dan relevansi setiap perkembangan zaman yang berubah-ubah perlu lahirnya berbagai inovasi sebagai respon atas perubahan yang terjadi, melalui ide dan gagasan sebagai buah pikir sikap kreativitas sebagai dasar untuk memecahkan setiap masalah.

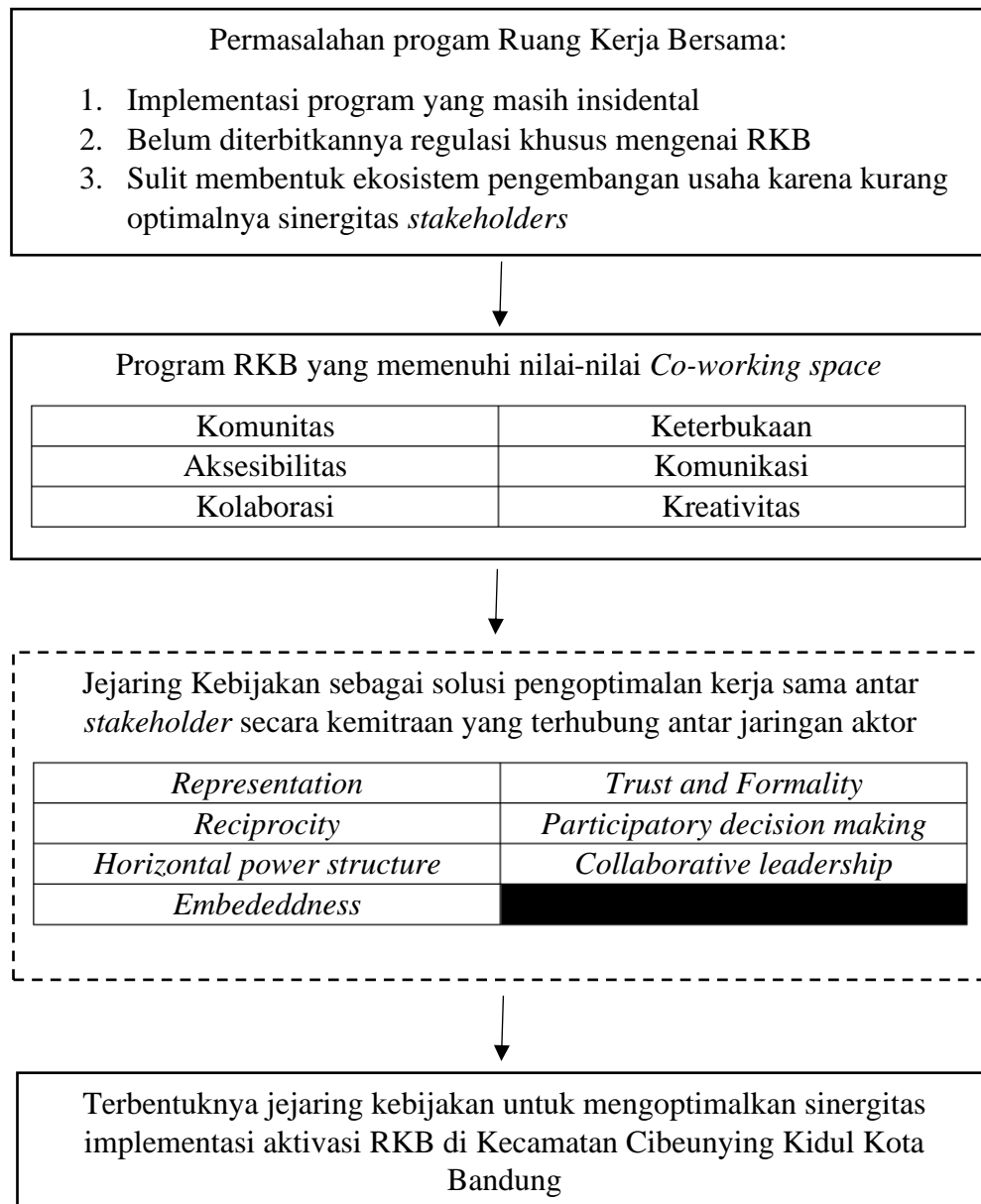
2.2 Kerangka Berpikir

Kebijakan program RKB sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis *co-working space* (CWS) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pendampingan usaha yang mengadopsi nilai-nilai kapasitas suatu

komunitas, aksesibilitas, kolaborasi, pola komunikasi, sikap keterbukaan dan kreativitas yang menjadi pola pikir setiap *coworkers*.

Sebagai pendukung analisis, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh De Leon dan Varda (2009:60). Teori yang dikemukakan lebih dikenal dengan teori jejaring kebijakan kolaboratif (*collaborative policy networks*). Pemilihan teori jejaring kebijakan kolaboratif ini dilatar belakangi karena program aktivasi ruang kerja bersama merupakan sebuah *platform* kolaborasi dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat sehingga pemilihan teori ini tepat untuk menggambarkan fenomena yang terjadi untuk mencapai tujuan aktivasi ruang kerja bersama maka dibutuhkan peran multi aktor yang berjejaring yang dapat diukur dengan pendekatan yang dikemukakan De Leon dan Varda (2009:60) mengenai karakter jejaring kebijakan kolaboratif, yaitu:

1. *Representation* (keterwakilan), yaitu partisipasi dari berbagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang sama untuk menyukseskan program aktivasi ruang kerja bersama di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. *Reciprocity* (hubungan timbal balik), yaitu timbal balik berupa bentuk kerjasama antar aktor salah satunya berupa pertukaran sumber daya dalam pelaksanaan program aktivasi ruang kerja bersama di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
3. *Horizontal power structure*, yaitu merujuk kepada kolaborasi yang terstruktur bersifat horizontal karena dalam jejaring kebijakan tidak ada aktor yang merasa paling berpengaruh.
4. *Embeddedness* (keterlibatan), yakni pelaksanaan program akan berjalan baik jika terbangun melalui kedekatan antar aktor yang terlibat.
5. *Trust and formality* (kepercayaan dan formalitas), untuk melihat sejauh mana kepercayaan antar aktor dalam membangun komitmen secara formal.
6. *Participatory decision making* (Partisipasi pembuat kebijakan), yaitu partisipasi aktor-aktor yang terlibat saat pengambilan keputusan.
7. *Collaborative leadership* (kepemimpinan kolaboratif), yaitu hadirnya peran pemimpin yang mengakomodir seluruh masukan dan saran dari masyarakat untuk kemudian dikaji secara kolektif.



Alur berpikir : —————→
 Fokus penelitian : - - - - -

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, peneliti dapat menyatakan proposisi terkait Jejaring Kebijakan Program Aktivasi Ruang Kerja Bersama yang harus mencerinkan nilai-nilai pengembangan *co-working space* yakni komunitas, aksesibilitas, kolaborasi, keterbukaan, komunikasi dan kreativitas. Sejatinya, program ini berada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta setiap wilayah Kecamatan sebagai pelaksana salah satunya Kecamatan Cibeunying Kidul yang melaksanakan aktivasi Ruang Kerja Bersama, yang ditentukan oleh karakter jejaring kebijakan kolaboratif (*Representation, Reciprocity, Horizontal power structure, Embeddedness, Trust and formality, Participatory decision making dan Collaborative leadership*).